



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN SUGIADA
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 206989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.086.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/99 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah Seluas 2.400 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
7. Tanah Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 666.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 249.100.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, SUZUKI FL 125 SCD/SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
27.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.556.211.585

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.907.661.585

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.907.661.585

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.